

Kode/Rumpun Ilmu: 597/Ilmu Pemerintahan

USULAN

HIBAH PENELITIAN KEMITRAAN



**POLA PEMBIAYAAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMENANGAN PEMILUKADA DI JAWA TENGAH TAHUN 2018**

PENGUSUL

Sakir, S.IP., M.IP/NIDN: 0506118902

Anwar Kholid, S.IP., M.IP/NIDN: 0505028604

Anugrah Esa Oktoricho Al-Amin/NIM: 20150520037

Muhammad Taufiq Fatchurrahman Bengkulah/NIM: 20150520214

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DESEMBER 2018**

Judul Penelitian

POLA PEMBIAYAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMENANGAN PEMILUKADA DI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Uraian Penelitian

Tahun Usulan	2018
Tahun Pelaksanaan	2019
Durasi Kegiatan	1 Tahun
Usulan Tahun ke-	1
Rumpun Ilmu/Sub Rumpun Ilmu	Ilmu Pemerintahan
Jumlah Tim	4 Orang
Usulan dana	Rp. 15.000.000,-
Luaran Wajib	1) Jurnal Nasional ber-ISSN/Terakreditasi <i>a) Jurnal Politik, Universitas Indonesia</i> <i>b) Jurnal ARISTO, Univ. Muhammadiyah Ponorogo</i> 2) Prosiding Seminar Nasional/Internasional <i>ICONPO 2019, Agustus 2019 di KKU, Thailand</i>
Luaran Tambahan	Skripsi Mahasiswa

**HALAMAN PENGESAHAN
HIBAH PENELITIAN KEMITRAAN**

Judul Penelitian : Pola Pembiayaan Partai Politik Dalam Pemenangan
Pemilukada di Jawa Tengah Tahun 2018

Kode/Rumpun Ilmu : 597 /Ilmu Pemerintahan

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Sakir, S.IP., M.IP
b. NIDN/NIK : 0506118902
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
e. Nomor HP : 081392529488
f. Alamat email : mas.sakir@fisipol.umy.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Anwar Kholid, S.IP., M.IP
b. NIDN/NIK : 0505028604
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
e. Alamat email : anwar.kholid@fisipol.umy.ac.id

Anggota Peneliti Mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap : Anugrah Esa Oktoricho Al-Amin
b. NIM : 20150520037
c. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Anggota Peneliti Mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap : Muhammad Taufiq Fatchurrahman Bengkulah
b. NIM : 20150520214
c. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Biaya Penelitian :

- diusulkan ke UMY : Rp. 15.000.000,00
- dana internal Prodi : Rp. 0
- dana institusi lain : Rp. 0
- *inkind* sebutkan : Rp. 0

Yogyakarta, 6 Desember 2018

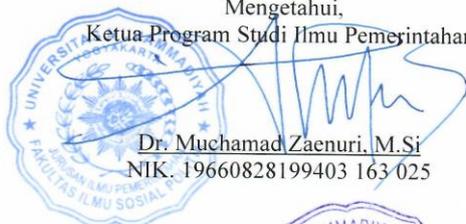
Ketua Peneliti,



Sakir, S.IP., M.IP

NIK. 19891106201604 163 156

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK. 19660828199403 163 025

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Drs. Husni Amriyanto Putra, M.Si

NIK. 19690301199406 163 026

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola pembiayaan partai politik dalam pemenangan Pemilu di Jawa Tengah tahun 2018. Dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai sumber pembiayaan partai politik, bentuk dan pola penggunaan pembiayaan, dan tujuan pembiayaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Biaya politik yang mahal telah memunculkan isu mengenai beratnya beban partai politik (Parpol) dalam menjalankan perannya sebagai instrumen demokrasi. Beberapa kegiatan politik, termasuk kampanye, membutuhkan biaya yang mahal. Selain mekanisme penggunaan biaya kampanye politik, terdapat juga persoalan lain yang terkait dengan kelemahan pengaturan dana kampanye yang bersumber dari partai politik itu sendiri. Praktik pembiayaan partai menjadi persoalan utama yang memicu gelombang korupsi di sejumlah negara (Hopkin dalam Faisal et al., 2018). Timbulnya korupsi politik memang bukan disebabkan semata oleh permasalahan pembiayaan partai. Data statistik yang dimiliki KPK memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017 terdapat sebanyak 18 Gubernur dan 71 wali kota/bupati/wakil terjerat kasus korupsi. Lalu, pada periode 2004 sampai Oktober 2014 tercatat 76 anggota DPR dan DPRD menjadi tersangka dan terdakwa KPK.

Tindak pidana korupsi seperti ini terus terjadi karena politik uang dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa (Mahfud, 2003: 228). Selain itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, pernah menyebutkan bahwa pada periode 2004-2012 sebanyak 290 Kepala Daerah terlibat kasus hukum, yang di dalamnya termasuk tindak pidana korupsi (Faisal, Bariroh, & Mulyanto, 2018). Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan menganalisis pola pembiayaan partai politik dalam pemenangan Pemilu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha pembuatan model akuntabilitas pembiayaan partai politik. Penelitian ini akan dilakukan dengan skema penelitian kemitraan dengan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY untuk dijadikan sebagai topik penelitian skripsinya. Target luaran dari penelitian ini adalah publikasi di Jurnal Nasional ber-ISSN/Terakreditasi, Prosiding Seminar Nasional/Internasional, dan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa.

Kata Kunci: *Pola Pembiayaan, Partai Politik, Pemilu.*